

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### A. SIMPULAN

Penelitian ini mendalami tentang pemikiran Ir. Sukarno mengenai Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Simpulan umum dari penelitian ini adalah sosio-nasionalisme & sosio-demokrasi merupakan intisari dari Ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dalam bingkai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat baik di bidang politik dan ekonomi. Adapun simpulan khusus adalah sebagai berikut :

1. Pemikiran Sukarno dilatarbelakangi oleh berbagai aspek dalam kehidupannya. Pemikiran sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi lahir dari latarbelakang pendidikan yang diberikan di sekolah dan keluarganya. Pengekangan dan penindasan yang dialami Sukarno semasa kecil oleh pemerintah kolonial dan teman-temannya dari Belanda, menghasilkan sebuah gagasan yang menolak adanya perlakuan menindas antar sesama manusia. Sikap diskriminasi yang didapatkan oleh Sukarno, menjadi salah satu faktor yang membuat Sukarno menginginkan keadilan bagi masyarakat. Selain dari pengalaman masa kecil, Sukarno sering membaca buku dan berdiskusi tentang ajaran-ajaran yang dipelajarinya. Untuk membumikan pemikirannya tersebut, Sukarno melakukan berbagai aktivitas politik melalui pergerakan yang diwadahi oleh organisasi politik yang dibentuk Sukarno.
2. Pokok-pokok pemikiran sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi adalah mengenai konsep nasionalisme dan demokrasi yang sesuai dijalankan di Indonesia. sosio-nasionalisme merupakan sebuah gagasan kebangsaan untuk menerapkan rasa kebangsaan yang ber-prikemanusiaan melalui perilaku positif dalam berpolitik. Sosio-nasionalisme merupakan nasionalisme yang lebih dari rasa cinta terhadap bangsanya, melainkan dengan cara dan tujuan yang ideal untuk diterapkan di Indonesia. Sosio-nasionalisme adalah sebuah antitesa dari nasionalisme barat yang melakukan penindasan dan eksploitasi

terhadap bangsa-bangsa lain. Sedangkan sosio-demokrasi adalah sebuah demokrasi yang berdiri atas dua unsur fundamental. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dalam artian, sosio-demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang politik dan ekonomi. Untuk menjaga keseimbangan tersebut maka dijalankan lah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang merupakan intisari dari ideologi Pancasila.

3. Revitalisasi pemikiran sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi adalah sebuah upaya mengembalikan pokok-pokok pemikiran mengenai nasionalisme dan demokrasi yang ideal di Indonesia. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan bangsa yang kian banyak di era kontekstual. dalam proses pengembalian dan menguatkan kembali pokok-pokok pemikiran tersebut, perlu dilakukan sebuah kajian mendalam bagi masyarakat untuk memahami konsep yang ideal untuk dipakai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, budaya, dan latarbelakang sejarah bangsa Indonesia. Gagasan ini dapat diterapkan di era modern dengan cara menghilangkan segala bentuk penindasan dalam bentuk politik, ekonomi, kebudayaan yang dilakukan oleh bangsa asing maupun bangsa sendiri melalui produk hukum yang berorientasi pada masyarakat sesuai dengan Ideologi Pancasila seperti, pembatasan kekuasaan pada pemerintah yang berlandaskan konstitusi, pengelolaan SDA Bangsa Indonesia, pencegahan intervensi politik, dan KKN, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harus berjalan seimbang untuk menjamin kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia.

## **B. IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Setelah mengkaji permasalahan yang muncul dalam penelitian, maka peneliti mendapatkan pemahaman yang menghasilkan implikasi dan rekomendasi. Adapun implikasi dan rekomendasi yang dapat peneliti berikan diantaranya :

### **1. Untuk Pembuat Kebijakan**

- a. Lembaga eksekutif harus berperan melaksanakan prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang menjadi alat untuk melaksanakan pemerintahan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sarana terbaik dalam pemberian wawasan kebangsaan adalah di dalam tubuh partai politik, sehingga kader-kader yang dilahirkan dari partai politik dapat memberikan sumbangsih secara pemikiran dan perilaku politiknya untuk membangun bangsa berdasar Ideologi Nasional dan menempatkan kekuasaan yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan rakyat. Partai politik harus menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi para kader yang nantinya menduduki pemerintahan dan menjadi pejabat publik.
- b. Pembuat kebijakan di bidang legislatif harus membuat produk hukum yang berorientasi kepada masyarakat dan menjamin hak politik maupun hak ekonomi warga negara melalui cara-cara yang humanis seperti pembatasan kekuasaan politik berdasar konstitusi, pengelolaan SDA yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tanpa eksploitasi pihak asing dan kewibawaan bangsa secara ekonomi, membentuk badan ekonomi kolektif berdasar koperasi untuk membangun cita-cita ekonomi kerakyatan ala Indonesia yang berasaskan gotong royong untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, petani dan pedagang kecil dipertahankan untuk tidak tersingkir oleh maraknya pasar-pasar modern dan pemodal besar yang bersaing dalam putaran bisnis di Indonesia. Mencegah intervensi politik yang dilakukan bangsa asing terhadap bangsa Indonesia.

- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan rekomendasi dan pelatihan bagi seluruh pendidik di Indonesia untuk menyisipkan karakter nasionalisme dan cinta tanah air, melalui sikap kemandirian bangsa di setiap mata pelajaran untuk membentuk karakter dan kepribadian unggul peserta didik baik di tingkat perguruan tinggi maupun sekolah dasar.
  - d. Pembuat kebijakan di Departemen Pendidikan Keawarganegaraan harus melakukan upaya pengembangan pemikiran politik berbagai tokoh secara mendalam untuk meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa dalam mempelajari objek kajian terutama dalam mata kuliah Filsafat Politik, Ilmu Politik dan Ilmu Negara dengan mengkaji secara mendalam hakekat pemikiran tokoh bangsa terkait pemikiran politik yang dapat diimplementasikan bagi bangsa. Para Pendidik maupun mahasiswa diharuskan mampu memahami secara keilmuan maupun nilai sikap yang terkandung dalam asas-asas perjuangan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan generasi muda yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur.
2. Untuk Peneliti Berikutnya
    - a. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber kajian keilmuan mengenai konsep nasionalisme dan konsep demokrasi yang ideal bagi bangsa Indonesia, yang terdapat pada beberapa mata kuliah di Departemen PKn.
    - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik kepada pemikiran politik tokoh bangsa.
    - c. Penelitian berikutnya dapat menggali pemikiran politik pendiri bangsa mengenai topik lain selain sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
  3. Untuk Pemecah Masalah di Lapangan

Bagi pemecah masalah di lapangan diharuskan memunculkan sebuah sinergitas antara masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan. Sinergitas dari seluruh masyarakat dapat membuahkan pemahaman dan kesejahteraan atas perilaku yang berdasar kepada konsep sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Selain pemenuhan hak politik dan hak ekonomi, masyarakat dapat melakukan kewajiban politik dan ekonomi untuk mencapai kemandirian dan membentuk sikap yang tidak bergantung pada bangsa lain. Menghapuskan berbagai macam

diskriminasi SARA yang terjadi di Indonesia untuk menciptakan rasa kemanusiaan bagi bangsa Indonesia, memperkuat ekonomi kerakyatan bagi rakyat kecil dengan mengembangkan sektor usaha kecil menengah agar mampu bertahan di tengah persaingan pasar Indonesia.